

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 4 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Pemberian Nafkah Mut'ah dalam Persidangan di Mahkamah Syariah Malaysia

Mohd Asyraf Huzaifi Bin Husen

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

asyrafhuzaifi21@gmail.com

Abstrak

Nafkah mut'ah adalah pemberian kesenangan hati dari suami kepada bekas istri yang diceraikan tanpa sebab yang seharusnya. Di dalam ordinan undang-undang keluarga Islam Sarawak menjelaskan tentang nafkah mut'ah, tetapi tidak menjelaskan jumlah yang harus diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik pengajuan nafkah mut'ah di mahkamah syariah Sibu Sarawak dan dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan permasalahan terkait nafkah mut'ah. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dan pendekatan penelitian adalah kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Mahkamah Syariah Sibu, Sarawak. Hasil penelitian dari praktik pengajuan nafkah mut'ah di Mahkamah Syariah Sibu Sarawak, Pemohonan boleh dilakukan dalam sidang perceraian atau setelah sidang perceraian. Pengajuan mempunyai beberapa peringkat, pertama permohonan haruslah pergi ke meja pendaftaran bersama advokat untuk melengkapi berkas. Selanjutnya, pegawai pendaftaran menetapkan tanggal persidangan 21 hari setelah hari pendaftaran. Kemudian, tempoh masa dan pelaksanaan nafkah mut'ah ini membutuh waktu selama satu tahun atau lebih sekiranya di dalam persidangan tersebut terdapat permasalahan seperti kekurangan alat bukti. Adapun Dasar pertimbangan hakim di Mahkamah Syariah Sibu Sarawak dalam menyelesaikan permasalahan nafkah mut'ah berlandaskan pada tiga dasar yang utama yaitu Al-Quran, ordinan Majlis Islam Sarawak Tahun 2001 dan Arahan Amalan Ketua Hakim Syariah Malaysia Nomor (9).

Kata Kunci: Implementasi; nafkah mut'ah; ordinan

Pendahuluan

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.¹ Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak akan terjadi perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu Negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri. Dalam hal perceraian suami harus memenuhi segala hak istri antaranya hak nafkah lahir dan batin. Suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan mut'ah yaitu pemberian berupa uang atau benda

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1989), 42.

lainnya mengikut kemampuan suami. Perkara ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 241:

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ الْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”²

Dalam hukum positif di Malaysia khususnya di Sarawak, mut'ah dijelaskan di dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak tahun 2001 Bagian V tentang Pembubaran Perkahwinan, Seksyen 56 Mut'ah atau pemberian saguhati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut. Didalam Seksyen 56 tersebut menjelaskan bahwa:

“Selain haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut'ah atau pemberian saguhati kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh, selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahwa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut Undang-Undang Islam.”³

Didalam ordinan ini, Hakim sebelum memutuskan perkara hendaklah mendengar dari kedua belah pihak yang berperkara suami maupun istri yang dimana istri memohon ke Mahkamah Syariah menuntut Nafkah Mut'ah dari bekas Suaminya. Menarik untuk diteliti oleh peneliti didalam Seksyen 56 tersebut adalah ordinan tersebut tidak menyatakan jumlah nafkah mut'ah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya setelah penceraian berlaku dan bagaimana praktik dalam pengajuan nafkah Mut'ah di dalam Mahkamah Khususnya di Mahkamah Syariah Sibu, Sarawak. Namun, ketetapan Hakim yang menentukan jumlah Nafkah Mut'ah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara langsung maupun tidak langsung atau mengikut kemampuan suami.

Dibagian penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dan persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Antaranya yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ana Rosita, di dalam penelitian yang dilakukan menjelaskan bagaimana perlindungan yang harus diberikan hakim Pengadilan Agama Semarang kepada isteri yang ditalak. Karena dalam undang-undang tidak dicantumkan hukuman bagi suami yang tidak membayarkan mut'ah dan nafkah iddah kepada isterinya yang telah ditalak, sehingga ada kasus suami tidak membayar mut'ah dan nafkah iddah secara sukarela. Oleh karena itu perlindungan hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap hak-hak isteri berupa mut'ah dan nafkah iddah tersebut, salah satunya adalah dapat berupa kepastian pembayaran mut'ah dan nafkah iddah oleh suami dalam perkara cerai talak dan menunda persidangan ikrar talak, jika tidak dibayarkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Kepastian tersebut perlu dilakukan agar kehidupan isteri yang ditalak masih dapat terjamin dengan baik oleh suami. Persamaan, Skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan mempunyai persamaan dalam membahas mengenai Nafkah Mut'ah. Makalah perbedaan adalah Menjadi titik

² Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 39.

³ Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undang-undang Keluarga Islam, *Bahagian V-Pembubaran Perkahwinan*, (penerbit Negeri Sarawak: 2004).

perbedaan dalam skripsi ini adalah skripsi ini lebih membahas mengenai analisis dan tempat penelitian.⁴

Selain itu, yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rizqia Annisa Paramita, di dalam penelitian yang dilakukan ini menjelaskan tentang masalah Mut'ah dalam hukum Islam dan hukum perkawinan. Namun menurut pengamatan penulis sejauh ini belum ditentukan batas minimal dan batas maximum pemberian mut'ah baik ditingkat Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama maupun ditingkat Mahkamah Agung. Selain dari itu, masalah mut'ah belum mendapat tempat dan perhatian yang khusus dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung. Persamaan, Skripsi ini mempunyai persamaan dari segi bagaimana pemberian Nafkah Mut'ah. Perbedaan, Menjadi perbedaan dalam skripsi ini lebih meninjau dari segi Hukum Islam dan tempat penelitiannya.⁵

Seterusnya yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mokhtarudin Bin Haji Shariff, didalam penelitian ini menjelaskan hubungan prosedur Angkatan Tentera Malaysia (ATM) mengenai Nafkah Iddah dan Mut'ah. Didalam penelitian ini juga penulis memberi gambaran sejauh mana keberhasilan prosedur yang ada dalam perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) terhadap anggotanya berhubung dengan kasus-kasus sedemikian. Di samping itu penulis juga cuba untuk membandingkan prosedur Angkatan Tentera Malaysia dengan prosedur yang diamalkan dalam enakmen atau ordinan Negeri-Negeri dalam Malaysia dan peranan yang dimainkan oleh kedua-dua prosedur tersebut dapat menyelesaikan masalah nafkah iddah dan Mut'ah terhadap masyarakat Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Persamaan, Dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan mempunyai persamaan dalam membahas tentang Nafkah Mut'ah dan di Malaysia. Perbedaan, Titik perbedaan dalam skripsi ini adalah membahas mengenai prosedur dan tinjauan kes.⁶

Dari kutipan jurnal, terdapat beberapa jurnal yang menjadi persamaan dan perbedaan antaranya yang pertama yaitu Penentuan Kadar Kifayah Dan Ma'ruf Nafkah Anak Dan Isteri: Kajian Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah. Di dalam jurnal ini membahas mengenai Penentuan Kadar Kifayah Dan Ma'ruf Nafkah Anak Dan Isteri: Kajian Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah. Penulis di dalam jurnal ini menjelaskan mengenai penaksiran tentang nafkah untuk isteri dan anak yang dijelaskan didalam undang-undang. Mahkamah menentukan jumlah yang harus dibayarkan oleh suami kepada isteri dan anaknya mengikut pertimbangan hakim atas kemampuan suami. Selain dari itu, hakim Mahkamah Syariah juga memutuskan perkara mengenai permohonan kadar nafkah isteri dan anak bagi memenuhi maksud Kifayah dan Ma'ruf. Persamaan, Dalam skripsi ini mempunyai persamaan dengan penelitian dalam membahas tentang nafkah. Perbedaan, Menjadi perbedaan antara skripsi ini dengan peneliti adalah

⁴ Ana Rosita, *Analisis Pelaksanaan Mut'ah dan Nafkah Iddah (Studi Kasus Putusan No. 0985/pdt.g/2011/pa.sm. di Pengadilan Agama Semarang)*, di Semarang, S.Sy (Semarang, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Intitut Agama Islam Negeri Walisongo 2013).

⁵ Rizqia Annisa Paramita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Mut'ah dalam Putusan MA RI No. reg.441k/ag/1996.*, di Surakarta, S.Sy (Twinning Program Fakultas Agama Islam-Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010).

⁶ Mokhtarudin Bin Haji Shariff, *Nafkah Isteri: Iddah dan Mut'ah Mengikut Prosedur Angkatan Tentera Malaysia; Satu Tinjauan Kes. di Malaysia*, (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kulliyyah Undang-Undang 2000).

skripsi ini membahas tentang kadar nafkah anak dan isteri dan peneliti lebih memfokuskan kepada kadar nafkah mut'ah terhadap istri.⁷

Selain itu, yang kedua yaitu Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama) jurnal dari Syaiful Annas. mendiskusikan bagaimana pelaksanaan pembebanan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara talak (raj'i). Seringkali hakim dihadapkan pada problematika antara teks dan konteks. Adanya putusan yang membebaskan terhadap laki-laki membayar sejumlah nafkah iddah dan mut'ah sebagai hak bagi mantan istri, akan tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana putusan hakim, sehingga perempuan cenderung dirugikan, meskipun secara yuridis-formil dapat dituntut eksekusi, tetapi tidak mudah bagi pihak perempuan, karena kadang biaya pembebanan nafkah iddah dan mut'ah tidak sebanding dengan biaya melaksanakan eksekusi, belum lagi problem mantan suami yang pergi tanpa diketahui lagi keberadaannya setelah pengucapan ikrar talaknya. Oleh karena itu perlu terobosan hukum guna menjamin hak perempuan tersebut melalui putusan hakim dengan pertimbangan yang argumentatif terutama untuk menentukan masa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut. Dalam tulisan ini akan diurai alasan hukum dalam putusan pengadilan sebagai bahan pertimbangan hukum yang memuat unsur yuridis, sosiologis, filosofis dalam putusan tersebut. Persamaan, sama dalam membahas tentang nafkah mut'ah. Perbedaan, peneliti melakukan penelitian di Mahkamah Syariah Sarawak manakala di jurnal ini di Pengadilan Agama Indonesia.⁸

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Didalam penelitian ini, peneliti langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian yang berlokasi di Mahkamah Syariah Sibu Sarawak untuk memperoleh data mengenai Implementasi Pemberian Nafkah Put'ah Dalam Persidangan dengan cara mewawancarai dan bertemu langsung dengan narasumber-narasumber. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Selain itu, sumber data primer yang diambil adalah melalui wawancara kepada Hakim di Mahkamah Syariah Sibu, Sarawak yaitu yang arif Murshid bin Halim, Hattani bin Ali selaku Hakim Syarie dan Muhd Fairus selaku Peguam Syarie. Kemudian sumber data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini sebagai pelengkap yang diperoleh dari Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001, Ordinan Mahkamah Syariah Tahun 2001, Ordinan Tatacara Mal Syariah Tahun 2001, Ordinan Majlis Islam Sarawak 2001, Arahan Amalan nomor 9 tahun 2001, Jurnal-jurnal dan Kitab-kitab fiqh yang kesemuanya ada berkaitan dengan tema penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan Dokumentasi. Seterusnya, metode analisis data yang digunakan adalah Pemeriksaan Data, Klasifikasi, Verifikasi, Analisis dan Kesimpulan.

⁷ Raihanah Azahari, *Penentuan Kadar Kifayah Dan Ma'ruf Nafkah Anak Dan Isteri: Kajian Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah, di Malaysia, Jurnal*, (Universiti Malaya, Fakulti Syariah, 2012).

⁸ Syaiful Annas, *Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama), Jurnal*, 2017.

Hasil dan Pembahasan

Praktik pengajuan Nafkah Mut'ah di Mahkamah Syariah Sibu, Sarawak

Mahkamah Syariah terbagi kepada tiga peringkat yaitu Mahkamah Rendah, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Untuk pengajuan tuntutan nafkah mut'ah akan diajukan ke Mahkamah Rendah. Dalam perkara pengajuan Nafkah Mut'ah ini, permohonan boleh diajukan dalam sidang perceraian dan setelah sidang perceraian. Namun disini peneliti memfokuskan pengajuan yang dilakukan setelah sidang perceraian dikarenakan pengajuan nafkah mut'ah di Sibu Sarawak hanya banyak dilaksanakan setelah sidang perceraian. Pengajuan tuntutan nafkah mut'ah adalah merupakan salah satu permasalahan yang diatur dalam perkara mal (perdata) di dalam Mahkamah Syariah. Berdasarkan wawancara kepada Muhd Fairus selaku peguam syarie, beliau menyebutkan bahwa Segala perkara Mal akan diselesaikan di dalam Mahkamah Syariah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh JKSS (Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak).

Dalam JKSS (Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak) menetapkan piagam pelanggan atau administrasi dalam berperkara seperti berikut:⁹ 1) Untuk pengajuan berperkara dalam perkara mal, Tarikh (Tanggal) sebutan akan ditetapkan pada hari pendaftaran kes. 2) Menyebut sesuatu kes mal, faraid dan jenayah dalam masa 21 hari setelah didaftarkan. 3) Menyebut/membicarakan sekurang-kurangnya 80% daripada perkara mal didaftarkan dalam tempoh setahun. 4) Keputusan bertulis bagi kes mal dan faraid akan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari, manakala kes jenayah dalam tempoh 30 hari setelah penghakiman diumumkan dalam mahkamah. 5) Penghakiman akan dibuat dalam tempoh 30 hari setelah penggulgungan hujah. 6) Setiap aduan pelanggan diberikan maklumbalas dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh (Tanggal) aduan diterima dan 7) Mendengar rayuan kali pertama dalam masa 30 hari selepas rekod rayuan diterima daripada mahkamah yang keputusannya dirayu.

Didalam piagam pelanggan diatas menjelaskan bahwa setiap perkara dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara mal (perdata) harus mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh JKSS (Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak). Dari piagam pelanggan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perkara akan melalui proses yang ditetapkan oleh JKSS (Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak). Bermula dari hari pendaftaran sehingga keputusan akhir dari Sebutan perkara. Piagam pelanggan ditetapkan oleh JKSS (Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak) supaya pihak yang berperkara dapat menyiapkan diri dan menyediakan keperluan yang penting sebelum di sidangkan. Selain dari itu, apabila kasus pihak yang berperkara memerlukan keterangan atau bukti yang kukuh semasa dalam persidangan. Maka pihak mahkamah akan menundakan pelaksanaan sidang selama 30 hari atau 2 bulan kedepan. Seterusnya harus peneliti jelaskan bahwa terkait dalam pengajuan nafkah mut'ah di Sibu Sarawak, mayoritas umat Islam di Sarawak masih kurang pengetahuan mengenai tuntutan nafkah mut'ah hingga pengajuan untuk kasus Nafkah Mut'ah di Mahkamah Syariah tidak sebanyak seperti kasus yang lain. kesedaran masyarakat Islam di Sibu Sarawak ini masih lagi pada tahap kurang baik atau kurang pengetahuan tentang tuntutan nafkah mut'ah. Selain itu, proses yang sangat lama untuk diselesaikan menyebabkan masyarakat tidak mengambil peduli akan perkara tersebut.

Selain itu, cara pengajuan nafkah mut'ah. Dalam pengajuan untuk memohon tuntutan nafkah mut'ah, Muhd Fairus menyatakan pemohon akan ke meja pendaftaran untuk mengajukan permohonan yang ingin lakukan. Kemudian mengambil borang untuk

⁹ <https://syariah.sarawak.gov.my/page-0-299-80-Jabatan-Kehakiman-Syariah-Bahagian-Sibu.html>. Diakses pada Tanggal 12 September 2019.

di isi dan dilengkapi. Seterusnya, pihak mahkamah akan menetapkan tanggal pembicaraan kasus yang diajukan. Semua jenis pemberian nafkah harus diselesaikan di mahkamah syariah karena pemberian nafkah merupakan wewenang dalam mahkamah Syariah Sib, Sarawak. Dokumen perlu disediakan sendiri oleh pihak-pihak yang mendaftar kasus di mahkamah dan penyata tuntutan yang dibuat melalui peguam syarie. Terdapat beberapa maklumat yang perlu dinyatakan didalam pernyataan tuntutan, yaitu Nama dan maklumat plaitif (suami dan istri), Nama dan defenden (suami dan istri), Maklumat latar belakang perkawinan dan disertakan juga maklumat keluarga dan Maklumat perkawinan secara ringkas.

Pada saat pendaftaran untuk memulakan perkara, bekas istri diminta untuk melengkapi dokumen yang telah disediakan oleh pihak Mahkamah Syariah. karena yang menuntut hak Mut'ah adalah istri. Manakala suami tidak perlu mengisi dokumen tersebut dan hanya menunggu panggilan dari pihak mahkamah melalui surat panggilan. kebiasaan istri yang memohon ke Mahkamah untuk tuntutan nafkah mut'ah. Permohonan ini hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu seperti istri diceraikan oleh suami. Selain itu, tidak berlaku pada kasus seperti istri yang disumpah lian oleh suami, fasakh dan istri yang meminta cerai kepada suami. Istri yang telah menjalankan tanggungjawab dengan baik, akan tetapi diceraikan oleh suami tanpa sebab yang patut berhak untuk mendapatkan haknya dengan memohon tuntutan nafkah mut'ah ke Mahkamah. Untuk tuntutan nafkah mut'ah, boleh berlaku dalam sidang perceraian atau setelah sidang perceraian. Akan tetapi apabila tuntutan setelah dari sidang perceraian dan suami istri telah sah bercerai dan iddah isteri telah habis, istri boleh memohon ke mahkamah untuk meminta tuntutan mut'ah dari bekas suami.

Seterusnya, untuk proses memulakan prosiding, petugas di meja pendaftaran akan meminta kepada pemohon untuk menyediakan kelengkapan bagi memulakan prosiding. Undang-undang tentang memulakan prosiding tersebut telah disusun dalam Ordinan 44 Tahun 2001 yaitu Ordinan Tatacara Mal Syariah Bahagian III cara memulakan Prosiding Mal BAB 3 PERMOHONAN seksyen 13: 1) Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan kemudian daripada ini, tiap-tiap permohonan hendaklah dibuat melalui notis Borang MS 3 dan disokong dengan affidavit yang diangkat sumpah mengikut Ordinan ini. 2) Tiap-tiap permohonan hendaklah menyatakan dengan sepenuhnya jenis perintah yang dipohon, dan mengandungi fakta yang cukup terperinci untuk menyokong permohonan itu, dan melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya, hendaklah disampaikan kepada semua pihak dan orang yang berkepentingan dalamnya. 3) Dalam sesuatu permohonan, penentang hendaklah disebut sebagai responden.¹⁰ Dari seksyen 13 di atas dapat disimpulkan bahwa setiap permohonan harus disertakan dengan notis Borang MS 3 serta menyatakan permohonan yang ingin diajukan ke mahkamah syariah. Selain dari itu, harus menyertakan bukti untuk menyokong permohonan yang dilakukan. Seterusnya, Tergugat hendaklah disebut sebagai responden atau defenden dan disokong oleh affidavit yang telah diangkat sumpah.

Didalam seksyen di atas, Muhd Fairus mengatakan affidavit itu juga disebut di dalam ordinan bahagian xx - prosiding interlocutori dan perintah interim bab 1- prosiding interlocutori yang dimana pada seksen 190 mengenai affidavit menyebutkan: 1) Tiap-tiap permohonan hendaklah disokong dengan affidavit. 2) Mana-mana pihak- a) yang memfailkan affidavit yang dicadang hendak digunakan olehnya dalam apa-apa prosiding berhubungan dengan permohonan itu atau b) yang bercadang untuk menggunakan dalam

¹⁰ Ordinan 44 Tahun 2001 Tatacara Mal Syariah

mana-mana prosiding sedemikian apa-apa affidavit yang difailkan olehnya dalam prosiding yang terdahuluan hendaklah memberikan notis kepada tiap-tiap pihak lain tentang pemfailan itu atau tentang cadangannya hendak berbuat demikian, mengikut mana-mana yang berkenaan.

Selanjutnya peneliti akan menjelaskan proses pengajuan tuntutan nafkah mut'ah. Pengajuan tuntutan nafkah mut'ah ini akan dibantu oleh peguam syarie (advokat) untuk perjalanan kedepannya. pemohon dan responden masing-masing mempunyai peguam untuk membela diri, supaya dapat memudahkan urusan dalam negosiasi apabila tuntutan nafkah mut'ah yang besar dari pihak istri. Peguam juga berperan penuh apabila suami maupun istri mempunyai urusan atau dadurat. Seterusnya, melengkapkan berkas-berkas yang diperintahkan oleh mahkamah dan menyediakan bukti-bukti untuk mempertahankan hak masing-masing. Seterusnya tempoh masa dan pelaksanaan tuntutan mut'ah. Pelaksanaan dan tempoh masa tergantung kepada pembuktian yang diperdebatkan di dalam persidangan. Kerana dalam proses persidangan untuk tuntutan mut'ah ini, apabila tuntutan yang di minta oleh bekas istri terlalu besar, maka suami harus mempertahankan hak miliknya untuk mengurangkan tuntutan yang diminta. Untuk tempoh masa terkait tuntutan nafkah mut'ah ini mengambil masa satu tahun atau lebih. Setiap persidangan ditunda apabila keduanya menyatakan bukti-bukti kepada hakim. Apabila pembuktian kepada pembuktian dalam tempoh masa persidangan berlaku dan kedua suami dan isteri berpuas hati dengan pembuktian yang diberikan. Maka hakim yang akan berijtihad menetapkan jumlah yang harus diberikan oleh suami kepada bekas istrinya. Kesadaran masyarakat Islam di Sibu Sarawak masih kurang mengerti dalam hal terkait tuntutan nafkah mut'ah. Prosedur atau cara praktik dalam mahkamah Syariah ini telah diatur oleh JKSS (Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak) melalui piagam pelanggan yang sedia ada. Setiap yang berperkara haruslah mengikut proses dan masa yang telah ditetapkan oleh mahkamah Syariah.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Permasalahan Terkait Nafkah Mut'ah

Pengertian Nafkah Mut'ah. Sebelum pembahasan dilanjutkan, terlebih dahulu kita mengetahui makna sebenar dari nafkah mut'ah menurut hakim mahkamah syariah yang ada kaitannya dengan pembahasan yang akan dibahas. Peneliti mengemukakan definisi nafkah mut'ah menurut hakim dan perundangan untuk memastikan sama ada pengertian hakim itu selari dengan pengertian nafkah mut'ah itu sendiri. Menurut Hakim diatas yaitu yang arif Murshid bin Halim, tuntutan nafkah mut'ah merupakan tuntutan yang diminta oleh istri daripada bekas suami melalui mahkamah syariah atas alasan diceraikan tanpa sebab yang munasabah. Istri yang diceraikan oleh suaminya berhak untuk mendapatkan ganti rugi sekiranya telah menjalankan tanggungjawab sebagai seorang istri di dalam rumahtangga, akan tetapi diceraikan oleh suaminya tanpa sebab yang patut.

Berdasarkan pengertian nafkah mut'ah menurut hakim diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian nafkah mut'ah itu sendiri dan menurut hakim Murshid bin Halim mengenai nafkah mut'ah mempunyai perbezaan dalam arti dari nafkah mut'ah itu sendiri, akan tetapi mempunyai persamaan dalam pemberian kepada istri yang diceraikan. Namun di kerangka teori menjelaskan nafkah mut'ah adalah pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan, baik berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada istrinya serta menghindari dari kekejaman talak

yang dijatuhkannya itu.¹¹ Nafkah mut'ah dijelaskan di dalam ordinar Undang-undang keluarga Islam tahun 2001 yaitu pada seksyen 56 menjelaskan bahwa:

“Selain haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut'ah atau pemberian saguhati kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahwa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut Undang-Undang Islam.”¹²

Menurut seksyen 56 di atas menjelaskan bahwa istri yang diceraikan oleh suaminya tanpa sebab yang patut boleh ke mahkamah Syariah untuk memohon Nafkah mut'ah daripada suaminya. Hakim mahkamah Syariah akan memanggil keduanya untuk di sidangkan. Setelah persidangan, apabila suami didapati menceraikan istrinya tanpa sebab yang patut, hakim akan memerintahkan suami untuk memberi sejumlah uang kepada bekas istrinya untuk dijadikan tebusan dikarenakan cerai tanpa alasan yang munasabah. Manakala pengertian Nafkah mut'ah pada kerangka teori adalah merupakan pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kekejaman Talak yang dijatuhkan.¹³

Dari dua pengertian diatas dapat dipahami bahwa pengertian menurut hakim dan di kerangka teori tidak jauh berbeda, hanya bedanya dari segi bahasa, sedangkan dari segi makna ianya mempunyai maksud yang sama yaitu pemberian dari suami kepada bekas istri setelah perceraian. Tuntutan mut'ah ini hanya berlaku setelah perceraian. Perceraian merupakan upaya melepaskan ikatan perkawinan. Setelah perceraian berlaku dan masa iddah istri telah habis, istri boleh ke mahkamah untuk memohon tuntutan mut'ah. Selain itu, nafkah mut'ah ini terjadi di dalam perceraian yang pada hukum asalnya adalah makruh. Perceraian makruh apabila suami menceraikan istrinya tanpa ada sebab.¹⁴

Pada dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum bagi permasalahan nafkah mut'ah adalah bersandarkan Al-Quran dan Sunnah. Didalam hal-hal yang berkaitan dengan nafkah, yang arif Murshid dalam penerangannya menyatakan dalil Al-Quran surat Al-Thalaq ayat 7:

اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ آتَاهُ مِمَّا فَلْيَنْفِقْ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قُدْرَ وَمَنْ سَعَتِهِ مِنْ سَعَةٍ دُو لِيَنْفِقْ
يُسْرًا عُسْرٍ بَعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ آتَاهَا مَا إِلَّا نَفْسًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.¹⁵

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003), 92-93.

¹² Ordinar 43 Tahun 2001 Ordinar Undang-undang Keluarga Islam, Bahagian V -Pembubaran Perkahwinan, (penerbit Negeri Sarawak: 2004).

¹³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 92- 93.

¹⁴ Peunoh Dally, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 250-252.

¹⁵ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 559.

Berdasarkan ayat diatas, sudah jelas didalam ayat tersebut mengatakan bahwa orang yang mampu wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Ayat ini juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam hal terkait nafkah mut'ah yang harus diberikan oleh suami kepada bekas istrinya. Nafkah ini berlaku disebabkan oleh hubungan perkawinan, kenyataan dari hakim tersebut selari dengan kerangka teori yang telah dikemukakan oleh peneliti di bagian macam-macam nafkah.¹⁶ Hakim dalam menetapkan hukum terutama dalam perkara Mal (perdata) menggunakan mazhab Syafie sebagai rujukan utama. Beliau memperkuat lagi pernyataan tersebut dengan merujukan kepada ayat 1 hingga 3 Seksyen 39 ordinan Majlis Islam Sarawak tahun 2001¹⁷ yaitu: 1) Dalam mengeluarkan apa-apa fatwa di bawah seksyen 37, atau memperakukan pendapat di bawah seksyen 38, Majlis hendaklah pada lazimnya mengikut pendapat-pendapat yang diterima (qaul muktamad) Mazhab Syafi'i. 2) Jika Majlis berpendapat bahawa dengan mengikut qaul muktamad Mazhab Syafi'i itu akan membawa kepada suatu keadaan yang bertentangan dengan kepentingan awam, maka Majlis boleh, dengan keizinan khas Yang di-Pertua Negeri, mengikut qaul muktamad Mazhab Hanafi, Maliki atau Hanbali. 3) Jika Majlis berpendapat bahawa tiada satu pun qaul muktamad daripada empat Mazhab itu boleh diikuti tanpa membawa kepada suatu keadaan yang bertentangan dengan kepentingan awam, maka Majlis boleh, dengan keizinan khas Yang di-Pertua Negeri, membuat fatwa mengikut hematnya sendiri tanpa terikat dengan qaul muktamad mana-mana satu daripada empat Mazhab itu.

Beliau juga menyatakan bahwa adanya perintah dari ketua hakim syarie dalam arahan amalan nomor 9 tahun 2001 yang berjudul pemakaian pendapat mazhab fiqh yang memerintah semua hakim di mahkamah Syariah seluruh Malaysia untuk menggunakan pendapat-pendapat dalam mazhab-mazhab fiqh. Ketua hakim syarie di jabatan kehakiman Syariah Malaysia yaitu Dato' sheikh Ghazaki Bin Hj. Ab. Rahman menyebutkan dalam Arahan Amalan tersebut:

“Saya ingin menarik perhatian Y.A.A. kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil.2/2000 pada 9-11 Oktober 2000 di Melaka dan keputusan Mesyuarat Ketua-ketua Hakim Syarie kali ke 17 di Labuan 27 Oktober 2000 bersamaan dengan 26 Rejab 1421 telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerimapakai arahan berhubung pemakaian pendapat dari Mazhab-Mazhab Fiqh. Pengambilan pendapat Mazhab Mu'tabar hendaklah berpandukan kepada dasar yang telah ditetapkan oleh Raja Pemerintah bagi negeri yang mengeluarkan "tauliah" kepada Hakim-Hakim Syarie. Arahan ini adalah berkuatkuasa serta merta”.¹⁸

Berdasarkan penelitian, ada beberapa cara pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah mut'ah, diantara cara pertimbangan tersebut akan peneliti bagikan kepada lima bagian yaitu: pertama, pertanyaan hakim kepada kedua belah pihak. Kedua, cara hakim melihat kemampuan suami. Ketiga, upaya damai. Keempat, jaminan kepastian pembayaran mut'ah oleh suami dan terakhir bagaimana hakim menentukan bayaran mut'ah. Sebelum memulakan persidangan, kedua suami dan istri akan mengangkat sumpah dihadapan hakim supaya persidangan berjalan dengan lancar dan setiap pembicaraan dijawab dengan jujur dan tidak menafikan kebenaran dan menyatakan

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam, Jilid 4*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 2009), 128.

¹⁷ Ordinan Majlis Islam Sarawak Tahun 2001

¹⁸ Arahan Amalan Nomor 9 Tahun 2000

kebohongan. Hakim semasa di dewan mahkamah perlu menyiasat dengan mengajukan beberapa soalan terhadap bekas suami seperti berikut yang pertama, Apakah kamu telah menerima dokumen berisi tuntutan mut'ah dari bekas istri. Yang kedua, adakah kamu telah membaca dan memahaminya dan yang ketiga adakah kamu mengakui segala pernyataan tersebut.

Hakim menyatakan bahwa sebelum menetapkan atau memutuskan sesuatu perkara akan menanyakan kepada kedua suami maupun istri tentang kefahaman mereka terhadap tuntutan nafkah mut'ah yang harus diberikan oleh suami kepada istri. hakim akan menanyakan kepada bekas istri mengapa meminta jumlah yang sekian dari bekas suami. Seterusnya menanyakan kepada bekas suami apakah benar tuntutan yang diminta oleh bekas istri dengan jumlah yang dinyatakan. Selanjutnya hakim mengatakan setelah di soal mengenai tuntutan yang diminta istri, hakim akan menanyakan kepada suami apakah istri dalam rumah tangga sebelum penceraian berlaku menjalankan tugasnya sebagai istri dengan penuh tanggungjawab atau tidak. Seterusnya, hakim akan menanyakan, berapa bilangan anak, berapa bilangan jumlah nafkah perbulan diberikan oleh suami kepada istrinya dan berapa gaji perbulan yang diterima oleh suami.

Hakim mendengar penjelasan dari suami dan istri, hakim akan meminta keduanya untuk duduk dan kemudian pembicaraan diambil alih oleh peguam syarie (advokat) kedua belah pihak. Peranan peguam syarie di sini adalah, mempertahankan anak guaman bagi tuntutan yang besar. Berhubung dengan jumlah pemberian nafkah mut'ah, hakim akan menggunakan ijtihad bagi menetapkan jumlah yang seharusnya diberikan oleh suami kepada bekas istri. hakim akan menetapkan jumlah yang mengikut ijtihad (pertimbangan) tidak membebankan bekas suami. Karena jumlah yang harus diberikan terutama dalam hal terkait nafkah mut'ah tidak dinyatakan dalam undang-undang dan hanya dinyatakan tidak melebihi RM300000.00 (tiga ratus ribu ringgit Malaysia) didalam mahkamah rendah Syariah.¹⁹ Apabila pembuktian kepada pembuktian dalam tempoh masa persidangan berlaku dan kedua suami dan istri berpuas hati dengan pembuktian yang diberikan. Maka hakim yang akan berijtihad menetapkan jumlah yang harus diberikan oleh suami kepada bekas istrinya. suami harus menyertakan bukti pembayaran kepada bekas istri yang berupa tanda terima untuk disimpan oleh istri sebagai bukti pembayaran. Pembayaran boleh dilakukan dengan cara tunai atau hutang mengikut kemampuan bekas suami untuk membayar.

Selanjutnya, cara hakim menetapkan bayaran mut'ah adalah dengan cara potongan gaji perbulan bekas suami. Selain itu, pembayaran boleh dilakukan melalui KWSP (Kumpulan Wang Simpana Pekerja). Sekiranya tidak dibayarkan, istri boleh merayu ke mahkamah syariah dengan menunjukkan bukti tanda terima pembayaran terakhir bekas suami kepada hakim. Apabila terbukti suami tidak membayar kepada istrinya, maka mahkamah akan mengeluarkan surat perintah kepada suami untuk membayar tundaan mut'ah. Sekiranya suami masih belum membayar tundaan tersebut, mahkamah akan mengeluarkan surat perintah ke syarikat bekas suami (PNS) untuk memotong gaji bekas suami dan memasukkan uang kedalam rekening bank bekas istri. Berbeda halnya dengan suami yang bukan PNS, maka pihak mahkamah akan menyita salah satu harta milik suami untuk dilelangkan dan hasil tersebut akan dijadikan sebagai pembayaran.

¹⁹ Md. Yazid Ahmad, *Kajian Syariah dan Undang-undang, Siri 2*, (Malaysia: USIM, 2005), 26.

Kesimpulan

Praktik pengajuan nafkah mut'ah di Mahkamah Syariah Sibu, Sarawak akan dibantu oleh peguam syarie (advokat) karena hal tersebut merupakan satu syarat dalam pengajuan nafkah mut'ah di mahkamah rendah Syariah Malaysia. Selain itu, dengan adanya bantuan dari peguam syarie (advokat) akan memudahkan pemohon untuk mengisi form pendaftaran hingga ke proses persidangan. Adapun cara pengajuan tuntutan mut'ah mempunyai beberapa peringkat yaitu permohonan terlebih dahulu ke meja pendaftaran bersama peguam syarie (advokat) bagi melengkapkan berkas. Selanjutnya, pegawai pendaftaran akan menetapkan tanggal persidangan 21 hari setelah hari pendaftaran. Tempoh masa dan pelaksanaan nafkah mut'ah membutuh waktu selama satu tahun atau lebih sekiranya di dalam persidangan tersebut terdapat permasalahan seperti kekurangan alat bukti. Atas sebab proses pelaksanaan yang agak lama, permasalahan terkait Tuntutan Nafkah Mut'ah ini tidak diambil peduli oleh masyarakat yang hanya beranggapan setelah perceraian berlaku, maka terputuslah hubungan dan tanggungan oleh kedua belah pihak. Selain itu, sesetengah masyarakat masih kurang pengetahuan mengenai tuntutan nafkah mut'ah ini.

Dasar pertimbangan hakim di Mahkamah Syariah Sibu Sarawak dalam menyelesaikan permasalahan nafkah mut'ah berlandaskan Al-Quran surat Al-Thalaq ayat 7 yang berarti:” Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. Seterusnya, dalam menetapkan hukum terutama dalam perkara Mal (perdata) hakim akan menggunakan mazhab Syafie sebagai rujukan utama. Hal tersebut karena merujuk kepada ayat (1) hingga (3) Seksyen 39 ordinan Majlis Islam Sarawak Tahun 2001. Kenyataan ini diperkukuhkan lagi oleh Arahan Amalan Nomor 9 dan seksyen 39 Undang-undang Islam Sarawak yang memerintahkan semua mahkamah Syariah di Malaysia harus menggunakan mazhab empat yang mu'tabar yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'e dan Hambali dalam setiap putusan. Kesemua putusan hakim harus selari dengan apa yang telah ditetapkan oleh Ketua Hakim Syariah Malaysia dalam arahan amalan diatas. Adapun cara pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah mut'ah, terbagi kepada lima bagian yaitu: pertama, pertanyaan hakim kepada kedua belah pihak. Kedua, cara hakim melihat kemampuan suami. Ketiga, upaya damai. Keempat, jaminan kepastian pembayaran mut'ah oleh suami dan kelima cara hakim dalam menentukan bayaran mut'ah.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Md. Yazid, *Kajian Syariah dan Undang-undang, Siri 2*, Malaysia: USIM, 2005.
- Annas, Syaiful, *Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)*, Jurnal, 2017.
- Azahari, Raihanah, *Penentuan Kadar Kifayah Dan Ma'ruf Nafkah Anak Dan Isteri: Kajian Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah*, di Malaysia, Jurnal, (Universiti Malaya, Fakulti Syariah, 2012).
- Dally, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

- Dahlan, Abdul Aziz, *Eksiklopedi Hukum Islam, Jilid 4*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 2009.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003.
- Paramita, Rizqia Annisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Mut'ah dalam Putusan MA RI No. reg.441k/ag/1996.*, di Surakarta, S.Sy, Twinning Program Fakultas Agama Islam-Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010.
- Rosita, Ana, *Analisis Pelaksanaan Mut'ah dan Nafkah Iddah (Studi Kasus Putusan No. 0985/pdt.g/2011/pa.sm. di Pengadilan Agama Semarang)*, di Semarang, S.Sy, Semarang, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Intitut Agama Islam Negeri Walisongo 2013.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1989.
- Shariff, Mokhtarudin Bin Haji, *Nafkah Isteri: Iddah dan Mut'ah Mengikut Prosedur Angkatan Tentera Malaysia; Satu Tinjauan Kes. di Malaysia*, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kulliyyah Undang-Undang 2000.
- Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undang-undang Keluarga Islam
- Ordinan 44 Tahun 2001 Tatacara Mal Syariah
- Ordinan Majlis Islam Sarawak Tahun 2001
- Arahan Amalan Nomor 9 Tahun 2000
- <https://syariah.sarawak.gov.my/page-0-299-80-Jabatan-Kehakiman-Syariah-Bahagian-Sibu.html>. Diakses pada Tanggal 12 September 2019.